

Pasang Surut Perdagangan Pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821

Rima Agri Triacitra¹, Nor Huda², Nyimas Umi Kalsum³
^{1,2,3}Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang
email: rimaagritriacitra94@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pasang surut perdagangan pada masa Kesultanan Palembang dari tahun 1804-1821. Kajian historis ini mengambil rentan waktu dari masa Kesultanan Palembang sampai berakhirnya Kesultanan Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Munculnya Kesultanan Palembang pada abad ke 17-19 telah melatar belakangi kehidupan masyarakat Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Palembang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di pertemuan Sungai Musi, sehingga memberikan keuntungan bagi perkembangan daerah tersebut terutama di bidang perekonomian. Dalam perkembangannya perdagangan ini sering terjadinya pasang surut pasang surut yang disebabkan oleh banyaknya konflik yang terjadi di Kesultanan Palembang.

Kata kunci: kesultanan Palembang, sungai mus, perdagangan

Abstract

This article examines the ups and downs of trade during the Palembang Sultanate from 1804-1821. This historical study is vulnerable to time from the time of the Palembang Sultanate to the end of the Palembang Sultanate. This study used descriptive qualitative method. The emergence of the Palembang Sultanate in the 17-19th century has provided the background for the life of the Palembang people. Palembang as the center. The government of the Sultanate of Palembang has a very strategic location because it is at the confluence of the Musi River, thus providing benefits for the development of the area, especially in the economic sector. In the development of this trade, there were frequent ups and downs and ups and downs caused by the many conflicts that occurred in the Palembang Sultanate.

Keywords: Sultanate of Palembang, Musi river, trade

A. PENDAHULUAN

Munculnya Kesultanan Palembang pada abad ke 17-19 telah melatar belakangi kehidupan masyarakat Palembang.¹ Palembang sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Palembang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di pertemuan Sungai Musi, sehingga memberikan keuntungan bagi perkembangan daerah tersebut terutama di bidang perekonomian. Sungai Musi adalah sungai terbesar di Pulau Sumatera yang membelah kota Palembang. Kota Palembang terletak sekitar 90 kilometer dari muara sungai

¹ Nama Palembang berasal dari kata *Limang* yaitu kosakata Jawa yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar (*extraneous*). *Pa* adalah suatu kata depan yang digunakan oleh orang-orang Melayu, jika mereka hendak menyebut suatu tempat di mana berlangsung suatu usaha atau keadaan. Jadi *Pa-Limang* dalam kosakata Jawa diartikan sebagai tempat membersihkan biji atau logam. Lihat J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*, trans. Sugarda Purbakawatja (Yogyakarta: Ombak, 2015).

yang berujung di dekat Sunsang.² Keberadaan Sungai Musi inilah yang membuat kapal-kapal besar bisa masuk dan berniaga di kota Palembang yang kemudian mendukung kota Palembang untuk menjadi jalur utama perdagangan.

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Kesultanan Palembang semakin maju khususnya di bidang perekonomian. Kemajuan ini tidak terlepas dari kehancuran organisasi dagang kolonial VOC. Mata pencarian penduduk Palembang ialah dari berdagang, mengumpulkan hasil hutan, bertani, serta tambang. Sistem pertanian yang digunakan pada saat itu masih sederhana, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dari hasil pertanian mereka dijual. Dalam mengolah lahan pertaniannya, mereka menggunakan alat berupa beliung atau kapak ringan, pawang atau kapak. Komoditas hasil pertanian dari Palembang adalah lada. Sementara itu, hasil alam dari Palembang adalah timah. Selain lada, masih banyak produk pertanian lainnya yang dihasilkan oleh Palembang, seperti buah pinang, rami, pisang, kapas, gambir, nila, tembakau, dan sirih. Buah-buahan yang terkenal dari Palembang ialah bidara, jambu bol, jambu biji, prambeh, langsung, srikaya, buah nona, mangga, durian, cempedak, jeruk nipis, nanas, pepaya, rambutan, delima, dan duku.³

Komoditas timah dan lada merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan dan laku di pasaran. Berkat timah dan lada peran Kesultanan Palembang meningkat dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Jika pada masa Sriwijaya wilayah Palembang hanya dikenal sebagai kawasan yang strategis dan salah satu pusat perdagangan. Wilayah Palembang berkembang menjadi kawasan yang menghasilkan timah dan lada pada abad ke-18. Kedua komoditas ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kondisi itu membuat Palembang dikenal sebagai salah satu kesultanan yang masyhur. Kesultanan Palembang memanfaatkan keuntungan dari hasil perdagangan untuk membuat keraton yang besar dan kokoh, serta benteng-benteng dan kuburan keluarga sultan yang disebut Kawah Tengkreup dan membuat Masjid yang terindah di Hindia Timur.⁴

Dalam menjalankan perdagangan dengan rakyatnya, Sultan Palembang memberlakukan sistem *tibang* dan *tukong*.⁵ Sistem ini berfungsi sebagai pajak. Pada saat Sultan Najamuddin II memerintah, pemungutan *tibang-tukong* dilakukan tidak sesuai dengan

² Mestika Zed, *Kepialangan Politik Dan Revolusi: Palembang 1900-1950* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 28.

³ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825)* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 19-26.

⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵ *Tibang* ialah hak sultan untuk mendapatkan komoditas dari pedalaman yang ditukar dengan barang-barang impor. Barang-barang tersebut antara lain baju Jawa, kain Benggala putih, kapak/parang besi dan garam. *Tukong* adalah hak sultan untuk membeli komoditas dari pedalaman dengan harga yang telah ditentukan. Lihat Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, hlm. 31.

ketentuan. Sultan menetapkan agar tiap warga menyetorkan beberapa komoditas yang sebelumnya termasuk ke dalam *tibang* dan *tukong*.

Berbagai kebijakan yang berlaku di Kota Palembang mengikuti orientasi pemerintah yang berlaku pada saat itu. Hal ini juga menimbulkan perbedaan letak pusat pemerintahan yang berlaku di Palembang. Terjadinya pergantian pemerintahan dari tahun ke tahun membuat banyaknya perubahan kebijakan yang berlaku dari masa ke masa, terutama kebijakan di dalam pemerintahan dan perekonomian. Pengaruh kebijakan yang berlaku berdampak pada faktor fisik dan sosial masyarakat yang membawa perbedaan pola kemasyarakatan dan juga membawa pengaruh kepentingan yang berlaku di masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu perubahan pada lokasi pusat pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan penguasa pada saat itu.

Sebagaimana dengan penjelasan latar belakang di atas, maka perlunya kajian yang mendalam mengenai Kuto Gawang ke Kuto Besak Penelitian ini bermaksud untuk melihat penyebab perpindahan keraton-keraton Palembang tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor politik saja, tapi sangat dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi. Atas dasar inilah penulis tertarik memilih subjek penelitian berjudul **“Pasang Surut Perdagangan Pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821”**

Penelitian ini mengambil periode pada kurun waktu 1804 sampai 1821. Alasan mengapa dipilihnya tahun ini karena pada tahun 1804-1821 ialah masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II dimana pada masa pemerintahan Badaruddin II Kesultanan Palembang mengalami puncak kejayaan adanya ekspansi VOC dan jalur perdagangan mulai diambil alih oleh VOC serta pada mas itu sultan banyak melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Berdasarkan uraian pembatasan tersebut maka penulis tertarik menulis tentang mengapa terjadinya pasang surut perdagangan pada masa Kesultnan Palembang tahun 1804-1821 ?

B. METODE PENELITIAN

Metodologi adalah ilmu atau kajian yang membahas kerangka pemikiran (*frameworks*) tentang konsep-konsep, cara atau prosedur, yang digunakan untuk menganalisis suatu prinsip atau prosedur yang dapat mengarahkan dan menuntun dalam penyelidikan serta penyusunan dalam suatu bidang ilmu.⁶

Sementara itu, pengertian metodologi dalam penelitian sejarah merupakan prosedur atau metode yang digunakan untuk tahu cara mengetahui. Metodologi sejarah sebagai *science of methods* berarti sebagai ilmu yang membicarakan cara, yaitu cara untuk mengetahui peristiwa

⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 73.

yang terjadi di masa lampau (sejarah). Dalam metodologi sejarah, seorang sejarawan dituntut untuk menguasai metode yang digunakan agar mengetahui peristiwa masa lampau. Untuk itu dilakukanlah penelitian berupa prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sejarah, baik berupa arsip dan perpustakaan maupun wawancara dengan para tokoh yang masih hidup sehubungan dengan peristiwa sejarah.⁷

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan Metode Sejarah (*historis*). Metode sejarah adalah kerangka sistematis yang prinsip dan desain hukum untuk mengefektifkan pencarian sumber, yang merupakan materi sejarah, memberi kritikan dan menilai sintesis, yang merupakan generalisasi dalam format tulisan, untuk mencapai hasil yang baik.⁸

Adapun langkah-langkah metode Sejarah pada penelitian ini diantaranya adalah:

a. Heuristik

Dalam penelitian sejarah langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu pengumpulan sumber data (Heuristik). Heuristik merupakan teknik atau cara-cara menemukan sumber yang dapat dilakukan melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan, melalui interview untuk sejarah kontemporer atau upaya penelitian secara mendalam untuk menghimpun jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau.⁹

b. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber merupakan proses menguji suatu sumber, apakah sumber yang diketemukan asli atau palsu (kritik ekstern) dan apakah isinya dapat dipercaya atau dipertanggung jawabkan atau tidak (kritik intern). Kritik ada dua macam:¹⁰

1. Kritik Ekstern

Kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah.¹¹ Penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen. Idealnya seseorang menemukan sumber yang asli bukan rangkanya ataupun fotokopiannya. Di zaman sekarang kadang kala sulit membedakan antara yang asli atau bukan. Pengujian sumber (verifikasi)

⁷ Ibid., hlm. 74.

⁸ Dedi Irwanto and Alian Sair, *Metodologi Dan Historiografi Sejarah Cara Cepat Menulis Sejarah* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2014), hlm. 35.

⁹ Alian Sair, “Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian,” *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah* 2(2) (2012): hlm. 8.

¹⁰ Ibid., hlm. 10.

¹¹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 102.

pada tahap ini yaitu, menyangkut aspek-aspek luar dari sumber tersebut, seperti kapan, dimana dan siapa penulis sumber tersebut.¹²

2. Kritik Intern

Kritik intern adalah pengujian terhadap aspek-aspek “dalam” yaitu isi dari sumber sejarah.¹³ Kritik intern merupakan penentuan dapat tidaknya keterangan dalam dokumen digunakan sebagai fakta sejarah. Biasanya yang dicari adalah keterangan-keterangan yang benar. Tetapi keterangan yang tidak benar juga merupakan keterangan yang berguna. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya hubungan atau motif seseorang untuk menyembunyikan kebenaran sejarah.¹⁴

c. Interpretasi

Fakta-fakta yang terkumpul dan telah siap untuk digunakan itu belum berguna, jika belum diberi arti. Fakta akan terlihat memiliki arti apabila telah dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain, hal ini merupakan permulaan mengadakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada. Interpretasi dilakukan dengan menetapkan makna dan keterkaitan hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi diperlukan agar data yang mati dapat bicara atau mempunyai arti. Suatu peristiwa sejarah dapat ditafsirkan ulang oleh orang lain. Namun penafsiran yang berlainan tentang fakta-fakta sejarah mungkin saja terjadi, tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat peristiwa tersebut.¹⁵

Penafsiran sumber-sumber tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung, ialah dengan cara menghubungkannya agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai Keraton-keraton Palembang dan Pasang Surut Perdagangan di Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821.

d. Historiografi

Historiografi adalah suatu proses penyusunan hasil penelitian yang sudah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh dalam bentuk Tesis dengan judul “*Dari Kuto Gawang ke Kuto Besak: Pasang Surut Perdagangan Pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821*”

e. Pendekatan

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan yang dapat ditentukan dengan cara menganalisis permasalahan dan menjadi

¹² Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*.

¹³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 91.

¹⁴ Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*.

¹⁵ Sair, “Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian,” hlm. 11.

titik awal dalam meninjau permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosial ekonomi, Pendekatan ini bertujuan untuk melihat berbagai aspek yang ditimbulkan dari dampak ekonomi yang berkaitan dengan Pasang Surut Perdagangan Pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran sejarah menjadi lebih utuh, jelas dan menyeluruh sehingga dihindari kesepihakan atau determinatisme. Karena hubungan antara suatu aspek dapat memberikan pengaruh terhadap aspek lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Masyarakat

Sumatera Selatan sebagai kerajaan maritim yang mendapat pengaruh dari luar (jawa) masyarakat di daerah ini khusus di pusat kerajaan, di mana struktur masyarakatnya terdiri dari: Raja beserta keluarganya; golongan priyayi (Pangeran, Raden dan Masagus); golongan rakyat (non elite) yang terdiri dari Kiyai-mas, Kiyai-agus, dan rakyat jelata (orang-orang miji dan orang enan); golongan budak (budak karena hutang dan budak belian). Semua susunan masyarakat pusat kerajaan dan gelar-gelar para bangsawan atau pegawai-pegawai raja diatur dan ditetapkan oleh raja.¹⁶ Gelar-gelar tersebut semula diperoleh berdasarkan kelahiran. Sultan kemudian mengambil alih pemberian gelar tersebut. Sultan sering memberikan hadiah berupa gelar dan jabatan *jenang* atau *raban* kepada *pasirah* atau orang yang dipercayinya.¹⁷

Struktur masyarakat yang berlaku pada masa Kesultanan Palembang tersusun atas empat golongan, yaitu raja atau sultan, golongan bangsawan, golongan rakyat dan golongan budak. Struktur ini berlaku khusus bagi masyarakat pribumi baik yang tinggal di wilayah ibu kota kesultanan maupun penduduk bermukim di daerah pedalaman. Dalam struktur masyarakat Palembang posisi tertinggi atau puncak piramida kesultanan ialah sultan, hal ini dikaitkan dengan anggapan bahwa sultan ialah pengganti atau bayangan Allah di bumi dan kedudukannya dianggap setara dengan nabi. Seperti tergambar dalam *Kitab Sulatus Salatin* atau dikenal sebagai *Sejarah Melayu* diyakini bahwa raja ataupun sultan ialah figur yang mulia serta memiliki banyak kelebihan.¹⁸ Seperti dalam kutipan berikut ini:¹⁹

¹⁶ Ma'moen Abdullah et al., *Sejarah Daerah Sumatera Selatan* (Palembang, 1991), hlm. 95.

¹⁷ Zusneli Zubir, "Perjuangan Tionghoa Di Palembang," in *Bunga Rampai Sejarah Sumatera Selatan: Sumatera Selatan Dalam Kajian Sosial Dan Ekonomi* (Padang: BPSNT Padang Press, 2002), hlm. 21.

¹⁸ Nawiyanto and Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya* (Jember: Tarutama Nusantara dan Jember University Press., 2016), hlm. 54.

¹⁹ Husni Rahim, *Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 20.

Hendaklah kamu sekalian tuliskan kepada hatimu pada berbuat kebaktian kepada Allah Taala dan Rasul Allah Sallahu'alaihi Wassalam; dan jangan kamu sekalian melupai dari pada berbuat kebaktian, karena pada segala hukum bahwa raja-raja yang adil itu dengan Nabi Sallhualaihi Wassalam, seumpama dua buah permata pada sebetuk cincin, lagi pula raja itu Zillullah Fil'alam. Apabila ia berbuat kebaktian kepada raja, serasa berbuat kebaktian pada Nabi Allah; apabila berbuat kebaktian kepada Nabi Allah serasa berbuat kebaktian kepada Allah Taala. Firman Allah Taala Ati'ullaha Wa'ati'ur Rasula Wa Ulil Amri Minkum, yakni berbuat kebaktianlah kamu akan Allah dan akan Rasul-Nya dan akan raja.

Penduduk yang tinggal di Palembang sering disebut *matagawe* yaitu rakyat dalam sistem kesultanan secara keseluruhan. Konsep *matagawe* mengandung arti bahwa setiap penduduk dewasa atau telah kawin dan mempunyai tempat tinggal sendiri otomatis memperoleh status sebagai rakyat kesultanan. Segala hak dan kewajiban *matagawe* dilindungi oleh kesultanan. Sultan berhak meminta atau menagih *gawe* rakyat, sementara rakyat mendapatkan hak misalnya seperti menempati dan menggarap tanah milik sultan. Konsep pemilikan tanah yang diatur oleh adat menyebutkan bahwa sultan merupakan satu-satunya pemilik tanah yang sah; penduduk hanya mempunyai hak “menggawekan” atau mengerjakan dan menggarap lahan di dusun mereka masing-masing. Status *matagawe* ialah *tunggu ranah Raja* yang hanya berhak menempati dan “menggawekan” tanah, bukan menguasai apalagi memiliki tanah tersebut. Hal serupa juga berlaku dalam status mereka sebagai *matapajeg* “pembayar pajak” untuk kesultanan, termasuk apa yang disebut *tibang-tukong*. Rakyat yang khusus tinggal di ibukota Palembang disebut *miji* yaitu orang biasa yang kedudukannya sama dengan *matagawe* daerah pedalaman. Sebagian besar *miji* ialah orang-orang yang bekerja dan tunduk di bawah kekuasaan bangsawan dan pembesar kesultanan. Konfigurasi kelompok tersebut terlihat agak sedikit berbeda dibanding *matagawe*. Mereka umumnya hidup dalam sebuah persekutuan di bawah penguasaan bangsawan tertentu. Hampir setiap bangsawan memiliki sejumlah *miji* yang bekerja untuknya dan sekaligus menjadi bawahannya. Mereka dapat menjadi atasan dari *alingan* (keluarga), para pengikut *miji* dengan jumlah yang besar. Kelompok *miji* memiliki kekuatan tawar yang cukup tinggi. Mereka dapat memilih untuk

menolak atau berpindah kerja pada induk semang lain. Kelompok miji ini berkewajiban untuk menghimpun orang-orang (keluarga atau kelompok) yang disebut *alingan*.²⁰

Dalam struktur politik, kaum ningrat menduduki tempat yang tertinggi dalam tata urutan sosial. Di lingkungan keraton, lapisan atas aristokrasi dibentuk oleh golongan priyayi, yang terdiri atas keturunan raja dengan gelar pangeran dan raden. Sebagai imbalan politik kaum ningrat, raja Palembang menciptakan jabatan bangsawan sendiri, yang secara kolektif dikenal sebagai para mantri. Dalam golongan ini dapat diangkat orang dari semua lapisan penduduk sesuai keinginan sultan, dengan satu-satunya syarat bahwa mantri harus beragama Islam. Di samping orang Palembang, banyak sekali turunan Arab dan Cina yang diangkat ke dalam golongan ini. Nasib mantri sama sekali tergantung dari kebaikan sultan sebagai pelindungnya, sehingga raja lebih suka memilih calon dari golongan ini untuk memangku jabatan penting. Golongan mantri dibagi menurut status ibu mereka. Dalam hierarki sosial, tempat pertama diduduki oleh bangsawan yang berasal dari perkawinan priyayi dengan wanita dari golongan mantri. Golongan ini dengan gelar *masagus* sebenarnya merupakan kategori tersendiri. Meskipun para *masagus* berasal dari lingkungan priyayi, status mereka tetap di bawah raden, dan dalam pergaulan sehari-hari status mereka lebih mendekati para mantri. Di bawah *masagus* terdapat lapisan *kemas*, yang berasal dari perkawinan kedua pasangan dari golongan mantri. Pangkat bangsawan yang lebih rendah lagi adalah *kiagus*, yang berasal dari perkawinan *kemas* dengan wanita rakyat biasa.²¹

2. Struktur Pemerintahan

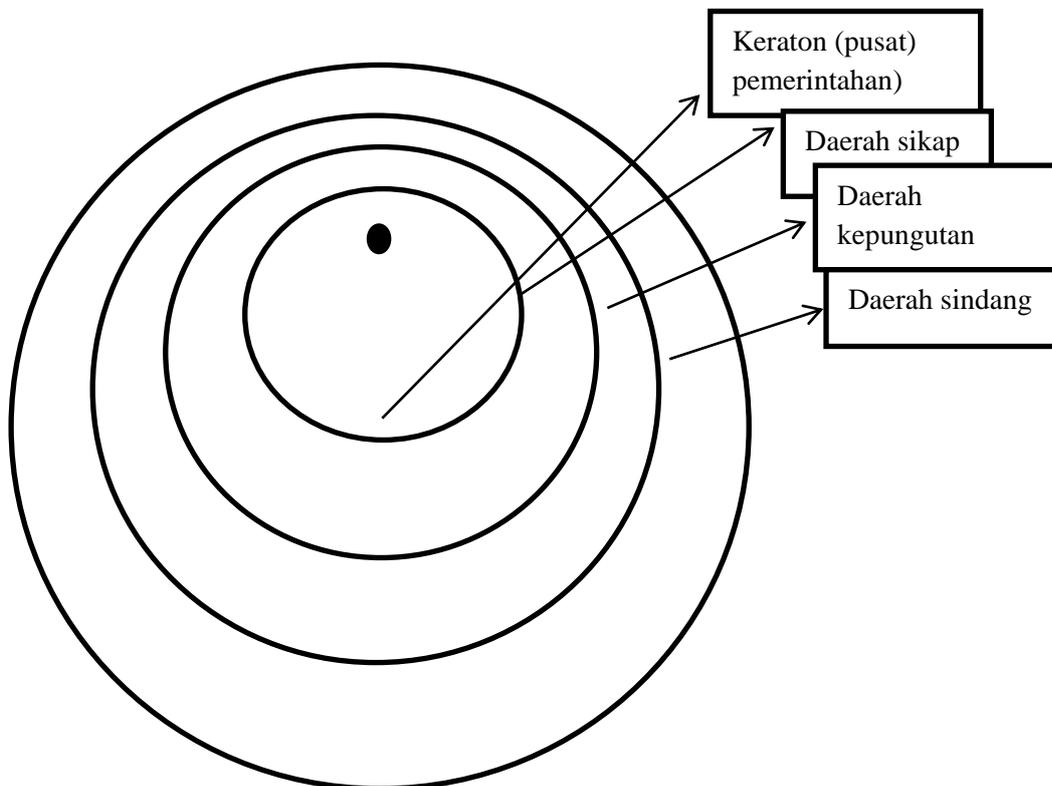
Struktur pemerintahan kesultanan Palembang dibagi atas pemerintahan di ibukota dan di daerah pedalaman, yang sering dikenal dengan daerah uluan. Daerah uluan yaitu daerah yang berada di hulu sungai Batanghari Sembilan, sebagai lawan Palembang yang berada di daerah hilir. Pemerintahan di daerah uluan dibagi atas tiga bentuk wilayah pemerintahan seperti: daerah *sikap*, daerah *kepungutan* dan daerah *sindang*. Daerah *Sikap* ialah daerah yang merupakan kelompok dusun atau himpunan dusun yang tidak berada dalam suatu wilayah marga dan diperintah langsung oleh pegawai kesultanan. Daerah *sikap* ini mempunyai kelebihan yaitu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, tetapi mereka diwajibkan kerja kepada sultan. Kerja untuk sultan ini sering disebut dengan *gawe raja*, ialah kerja yang bersifat langsung kepada sultan seperti: *pengayuh* atau mengayuh perahu dan *perpat* atau petunjuk jalan. Kemudian daerah *kepungutan* ialah wilayah kesultanan yang berada di

²⁰ Zubir, "Perjuangan Tionghoa Di Palembang," hlm. 21.

²¹ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo - Kaum Mudo; Perubahan Religius Di Palembang 1821 - 1942* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 9.

pedalaman dan dipimpin oleh seorang *raban* atau *jenang*. Raban dan jenang membawahi beberapa marga dan dusun serta mereka bertanggung jawab atau semua persoalan dalam wilayahnya. Raban atau Jenang ialah jabatan perantara antara sultan dengan *pasirah* (kepala marga) atau proatin (kepala dusun). Perintah sultan disampaikan melalui Raban atau Jenang karena mereka merupakan perantara antara kesultanan dan daerah pedalaman, mereka mendapatkan penghasilan dari pajak atau cukai hasil bumi, dan terakhir yaitu daerah *Sindang*, ialah daerah perbatasan dengan kepungutan. Daerah *sindang* ini dipimpin oleh depati (raja kecil) yang bebas dan tidak dibebani dengan pajak, tidak membayar upeti. Tetapi bertanggung jawab akan perlindungan perbatasan daerah kesultanan dari serbuan orang luar.²²

Agar lebih memahami struktur wilayah pemerintahan kesultanan Palembang diatas, dapat dilihat gambar berikut ini:



Struktur wilayah pemerintahan Kesultanan Palembang
Sumber (Husni Rahim, “Sistem Otoritas dan Administrasi Islam”. 1988.
Jakarta: logos. hlm. 66)

Dipemerintahan pusat Sultan sebagai penguasa tertinggi dan merupakan pusat kekuasaan. Dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahannya Sultan dibantu oleh

²² Rahim, *Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang*, hlm. 63-64.

Pangeran Ratu atau Pangeran Pati yang berkedudukan sebagai putra mahkota. Pangeran Ratu memegang peranan penting yakni sebagai penasehat Sultan dan terkadang sebagai wakil Sultan dengan kekuasaan penuh. Orang-orang yang mengitari sultan yang terdiri dari keluarga sultan memiliki pula hak-hak istimewa dalam pemerintahan.²³

Dibidang pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Pangeran Perdana Menteri yang bergelar Pangeran Noto Dirojo. Sementara penguasa tertinggi dibidang perdagangan dipegang oleh Syahbandar. Syahbandar mempunyai kedudukan istimewa dikalangan pegawai tinggi istana. Dalam menjalankan tugasnya mereka terkadang menerima kekuasaan penuh dari Sultan dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan kekuasaannya. Dalam tugasnya syahbandar mempunyai tugas dibidang perdagangan dan melaksanakan cukai perdagangan.²⁴

Penguasa Palembang pada awalnya memerintah dengan sikap-sikap kompromistis dengan penduduk setempat. Konsep pemerintahan ala Jawa berlaku hanya dipusat pemerintahan, yaitu ibukota, atau yang disebut “mancanegara”, diatur secara kompromistis. Terdapat beberapa daerah yang paling lemah dan paling dekat dengan ibukota menjadi kekuasaan langsung penguasa tertinggi di Palembang. Cara pendekatan ke daerah-daerah luar ibukota dapat melalui lembaga perkawinan. Sultan Abdulrahman berkat perkawinannya dengan putri penguasa Bangka mendapatkan warisan kepulauan Bangka.²⁵

Sikap kompromistis dan status quo penguasa Palembang tercermin dari penguasanya, antara lain yang dikenal dengan *undang-undang Simbur Cahaya* (Piagam Ratu Sinuhun). Undang-undang ini sekedar pedoman, bukan dimaksudkan sebagai hukum positif. Isi undang-undang ini lebih banyak mengatur pergaulan sosial di daerah pedalaman. Menurut penilaian J.W. Van Royen. Sultan-sultan tidak berbuat lain daripada mengukuhkan (*vastleggen*) hukum adat yang berlaku.²⁶

3. Pasang Surut Perdagangan Pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821

Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-12 merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Palembang. Kerajaan Sriwijaya runtuh akibat dikalahkan oleh Majapahit. Ketika Sriwijaya runtuh sebagai pusat niaga, maka lahirlah suatu daerah atau kota yang dalam ejaan China disebut *Palinfong* (yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kota Palembang). Kota ini

²³ Masyhuri, “Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825” (Tesis, Universitas Indonesia, 1983), hlm. 40-41.

²⁴ Ibid., hlm. 45.

²⁵ Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya Dan Sejarah Palembang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 169.

²⁶ Ibid., hlm. 170.

masih tetap eksis sebagai kota niaga yang di dalamnya masih terdapat suatu tumpuan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang masih dikenal sebagai *Ku-kang* (dalam bahasa China) atau Pelabuhan Lama. Kota Palembang menjadi tumpuan pelabuhan internasional yang secara khusus banyak disinggahi pedagang-pedagang dari China.²⁷

Kesultanan Palembang muncul sebagai warisan Sriwijaya dianggap sebagai proses aglomerasi wilayah. Kesultanan Palembang menjadi kekuatan komersil di pusat pelabuhan dengan mengendalikan perdagangan di aliran sungai Musi atas beragam kelompok etnik di daerah *ulu*. Oleh kekuasaan kesultanan, Palembang dikembangkan sebagai kota dengan kekuatan maritim dari kompetensi perdagangan setelah menurunnya Sriwijaya. Kekuasaan besar di Palembang muncul ketika Ki Gede Ing Suro mendirikan Kesultanan Palembang dengan membangun Keraton Kuto Gawang.²⁸

Pada masa itu Palembang merupakan sebuah wilayah yang dialiri oleh Sungai Musi dan anak Sungai Musi itu sendiri sehingga sungai-sungai tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Palembang.²⁹ Mata pencaharian masyarakat Palembang pada masa itu ialah bertani, mengumpulkan hasil hutan, menangkap ikan serta berdagang. Komoditas hasil pertanian Palembang adalah lada. Pada waktu Malaka dikuasai Portugis tahun 1511 jalur perdagangan dari pantai timur Sumatera ke pantai barat Sumatera mengakibatkan Banten dan Aceh menjadi pusat-pusat perdagangan terpenting di kepulauan. Aceh memonopoli daerah lada dari Aceh sampai ke Pariaman, sementara Banten meluaskan pengawasannya dari daerah Lampung, Silbera dan Palembang.³⁰

Penghasilan Kesultanan Palembang berasal dari berbagai sumber, seperti diperoleh dari bantuan lembaga elit yang disebut *Fexo*, yaitu pedagang kaya yang mendapat kedudukan sebagai wakil sultan. Kedudukan ini dapat diperoleh seseorang atas kecakapan yang dimilikinya sehingga sultan mempercayanya untuk ikut dalam memerintah sebagai wilayah Kesultanan Palembang. Namun, sumber terbesar penghasilan kesultanan itu berasal dari perdagangan. Bahkan bisa dikatakan bahwa sektor perdagangan ialah sektor terpenting pada masa kesultanan Palembang. Karena sektor perdagangan tidak hanya mencakup ruang lingkup domestik saja tapi melainkan juga menjangkau pasar ekspor.³¹

²⁷ Mohammad Syawaludin and Muhammad Sirajuddin Fikri, *Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan Dan Pergantian Kekuasaan Di Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Rafah Press, 2019), hlm. 67.

²⁸ Arlyana Abubakar et al., *Oedjan Mas Di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia Dan Heritage Di Sumatera Selatan* (Jakarta: Bank Indonesia Institue, 2020), hlm. 35-36.

²⁹ Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*, hlm. 13-15.

³⁰ Masyhuri, "Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825," hlm. 29.

³¹ Nawiyanto and Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya*, hlm. 77-78.

Mata pencaharian masyarakat Palembang adalah bertani, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan tambang serta berdagang. Komoditas yang berupa hasil pertanian Palembang adalah lada. Sementara itu, hasil alam dari Palembang adalah timah. Selain hasil pertanian lada, masih banyak produk pertanian lainnya yang dihasilkan oleh Palembang, seperti kapas (ditanam di lokasi bekas tanaman padi yang telah dipanen), gambir, nila, tembakau (tembakau Ranau sangat laku baik di Palembang maupun di luar Palembang karena disukai oleh konsumen sehingga memiliki nilai jual yang tinggi), sirih, buah pinang, rami dan pisang. Buah-buahan yang terkenal adalah mangga, durian, cempedak, jeruk nipis, nanas, jambu bol, jambu biji, pepaya, srikaya, buah nona, langsung, prambeh, duku, rambutan, delima, dan bidara.³²

Menurut laporan Pires, kecuali raja pembesar-pembesar dari kerajaan maritim itu juga turut mengadu untung dalam berbagai usaha perdagangan dan pelayaran, terkadang raja tidak memiliki kapal sendiri tetapi memiliki saham dalam kapal dan perahu yang pulang pergi dari malaka. Sistem *Patnerchip* demikian yang berlaku dalam sebagian besar perdagangan pada zaman itu disebut "Commenda". Oleh karena itu baik kekuasaan politik dan ekonomi dipegang oleh raja dan kaum aristokrat yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi modal atau terkadang sebagai peserta, pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran merupakan sendi-sendi kekuasaan mereka yang memungkinkan kesultanan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar. Untuk memungut semua penghasilan di dalam susunan birokrasi kesultanan, dibentuklah jabatan-jabatan seperti syahbandar dan penark-penarik pajak dengan pangkat mentri-pajak lautan. Syahbandar biasanya dipegang oleh orang-orang asing. Pentingnya peranan Sultan Palembang dalam perdagangan, sultan yang mengatur harga dan menandatangani kontrak-kontrak dengan pedagang asing. Selain berdagang, golongan priyayi dari tingkat tinggi (Pangeran), yang biasanya dianugerahi dusun/marga oleh Raja sebagai pinjaman, memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka dari hasil dusun/marga tersebut. Selain itu ada juga dari hasil pemeliharaan budak karena hutang dan budak belian itu dipekerjakan mengurus sawah, memelihara perahu-perahu tambang atau biduk-biduk.³³

Pada masa kesultanan Palembang pola yang menonjol dalam sistem perdagangan ialah adanya monopoli yang terpusat di tangan kesultanan. Sama halnya juga dengan pola perdagangan pada wilayah pedalaman diberlakukannya sistem *tibang-tukong*. Dalam hal ini, sultan mengirimkan barang-barang yang berasal dari Palembang seperti kain, garam, dan

³² Wargadalem, *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, hlm. 27.

³³ Abdullah et al., *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, hlm. 88.

barang lainnya yang dibutuhkan oleh wilayah pedalaman, kemudian barang ini dapat dibeli ataupun ditukar dengan wilayah pedalaman seperti, lada, damar, beras dan kapas. Dalam melakukan perdagangan ini sultan dibantu oleh syahbandar. Syahbandar ini bertanggung jawab akan pajak keluar masuk kapal-kapal di pelabuhan, memajukan pelayaran dan perdagangan serta menjaga keamanan para pedagang dari gangguan penjahat.³⁴

Hubungan Palembang dengan Belanda telah dirintis pada tahun 1617, yaitu tahun 1595-1629 pada masa pemerintahan Madi Ing Angsoka, ketika Gubernur Jenderal Jan Pietersoen Coen memegang kekuasaan di Batavia, ia mengirim utusan ke Palembang dibawah Cryn Van Raenburg untuk mengadakan hubungan dagang. Pada awalnya misi tersebut diterima dengan baik. Karena pada dasarnya Palembang sebagai kota dagang terbuka bagi semua pedagang asing termasuk pedagang Belanda. Dengan adanya hubungan dagang VOC, diharapkan akan menambah ramainya perdagangan dan pelayaran di Kesultanan, dan yang lebih utama lagi akan memberi keuntungan material bagi penguasa setempat.³⁵

Seperti yang dijelaskan oleh naskah silsilah anak bangsawan Palembang, bahwa antara Kesultanan Palembang dan Belanda beberapa kali melakukan perjanjian atau kontrak dagang. Kontrak-kontrak dagang tersebut terus diperbarui yaitu pada tahun 1662 kemudian tahun 1678, 1679, 1681, 1691, 1722, 1755. Dengan adanya kontrak tersebut, membuat VOC memonopoli perdagangan lada dengan mengontrol secara ketat pelayaran perdagangan Palembang.

Pada abad ke-17 dan ke-18, Kesultanan Palembang berada dalam puncak kejayaan. Pada masa kejayaan ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Penulis Inggris, Marsden menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Banyak kapal berkunjung di pelabuhan ini, dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. Beragam komoditas dagang dibawah oleh kapal-kapal tersebut masuk ke Palembang seperti beras, garam, dan bahan pakaian. Orang-orang Belanda mengumpulkan lada dan timah dari Palembang sesuai dengan kontrak antara VOC dengan Sultan Palembang. Pengangkutan lada dan timah dari Palembang masing-masing kurang lebih mencapai 2 juta pon.³⁶

Kemudian pada abad ke-18 menjadi masa-masa kemunduran untuk VOC sampai akhirnya dilikuidasi pada 31 Desember 1799. Hal ini diakibatkan oleh pejabat VOC banyak

³⁴ Nawiyanto and Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya*, hlm. 77-78.

³⁵ Makmun Abdullah, *Kota Palembang Sebagai Kota Dagang Dan Industri* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 28.

³⁶ Nawiyanto and Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya*, hlm. 36-37.

melakukan penyelundupan dan korupsi serta mundurnya perdagangan, Padahal sebelumnya VOC mempunyai kontribusi besar pada negara induk dengan kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya. Kekuasaannya semakin melemah, sehingga membuat VOC berusaha menutupinya dengan cara menambah hutang. Hutang VOC pada tahun 1783 mencapai f. 55 juta dan menjelang akhir abad ke-18 hutang itu semakin membesar menembus jumlah 12 miliar gulden. Dengan demikian akhir abad ke-18, VOC sebagai maskapai dagang besar yang terlilit hutang yang besar, ketidakefisiensian dan krisis keuangan yang membawanya pada kebangkrutan.³⁷

Disaat VOC dibubarkan, terjadi dua perubahan penting yaitu pertama, penobatan Sultan Mahmud Badaruddin II pada tahun 1804 Perubahan kedua ialah pembentukan pemerintah kolonial Belanda sejak 1800 pengganti VOC yang kemudian ditaklukkan oleh Inggris di Jawa pada tahun 1811.³⁸

Kesultanan Palembang tidak terlepas dari adanya konflik kepemimpinan di kalangan keluarga istana, selain adanya faktor kekuatan eksternal khususnya perkembangan imperialisme Inggris dan Belanda yang bertujuan untuk menguasai Palembang dengan menerapkan politik adu-domba. Keberhasilan kekuatan imperialisme dalam menaklukkan Kesultanan Palembang dengan jelas memperlihatkan bagaimana keberhasilan itu hanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu menggoyahkan peranan keluarga dalam pertahanan Palembang sehingga membuat munculnya konflik kepemimpinan antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II yang akhirnya membawa datangnya kehancuran bagi Kesultanan Palembang.³⁹

Pada awalnya kerjasama antara Inggris dan Palembang saling menguntungkan tapi ini mengakibatkan perpecahan dilingkungan Istana yang pada akhirnya membuat timbulnya dua pusat kekuasaan yang saling bermusuhan. Situasi ini mempengaruhi stabilitas perdagangan yang ada. Aktivitas perdagangan mengalami kemacetan dan yang kemudian mengalami kemunduran. Tapi pada tahun 1818 sultan Mahmud Badaruddin II dapat menguasai lagi seluruh wilayah kesultanan, perdagangan kesultanan dihidupkan kembali.⁴⁰

Menurut Woelders dalam bukunya *Het Sultanaat Palembang*, menggambarkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II ialah tokoh utama dari drama yang menghasilkan sebagian sejarah dari Historiografi Indonesia. Menurut kesaksian dari pihak lawan dan kawan

³⁷ Wargadalem, *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, hlm. 32.

³⁸ Abubakar et al., *Oedjan Mas Di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia Dan Heritage Di Sumatera Selatan*, hlm. 50-51.

³⁹ Nawiyanto and Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya*, hlm. 106-107.

⁴⁰ Masyhuri, "Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825," hlm. 121.

Badaruddin II ialah seorang yang bermartabat luhur, agung dalam sifat-sifat yang baik dan oleh sebab kepemimpinannya yang begitu kuat membuat Ahmad Najamuddin sebagai saingannya maupun keluarga yang didalam istana dibawah bayangannya. Badaruddin II dilukiskan oleh teman semasanya sebagai seorang penguasa timur yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, yang tau akan martabat kerajaan dan mengetahui bagaimana menempatkan norma-norma yang biasa dipunyai oleh manusia. Atas kedudukannya yang tidak dapat diganggu gugat maka ia dapat berbuat segala sesuatu sampai pada kekejaman-kekejaman dan tindakan luar batas, tanpa mengurangi kekuasannya sendiri. Badaruddin II ialah seorang yang cerdas, dan terpelajar seorang ganisator yang baik, seorang diplomat yang licin dan cerdas dan seorang ahli pertahanan yang pintar dan cekatan. Perhatiannya yang amat luas itu didalam bermacam lapangan, meliputi pula ilmu sastra.⁴¹

Selain itu, maraknya perdagangan bebas di penghujung abad ke-18 yang disebabkan oleh mundurnya VOC memberikan dampak positif membuat Palembang semakin kaya karena dilakukannya ekspor gelap oleh kesultanan (ekspor gelap Palembang ke Makau Tiongkok mencapai angka 20.000 pikul lada dan 27.655 pikul timah per tahun), sedangkan perdagangan dengan pemerintahan Belanda pada tahun 1800 hanya mengeskor sebanyak 5.000 pikul untuk masing-masing komoditas lada dan timah. Kondisi itulah yang dialami oleh putra mahkota yaitu Raden Hasan Pangeran Ratu yang saat naik tahta bergelar Sultan Mahmud Badaruddin II (1804-1821).

Sistem pertahanan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II lebih ditingkatkan lagi karena ancaman dari bangsa-bangsa asing semakin besar. Baik Inggris maupun Belanda memperlihatkan keinginannya menguasai perdagangan lada dan timah Palembang. Oleh karen itu, Sultan Badaruddin II membuat sistem pertahanan yang berlapis. Sistem yang dibangunnya mengintegrasikan juga elemen-elemen lingkungan dari dataran rendah dengan sungai-sungainya hingga pantai, selat dan perairan yang menghubungkan daratan dengan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kesultanan memperkuat sistem pertahanan darat maupun laut. Sistem pertahanan juga dilengkapi dengan senjata. Senjata ini diperoleh sultan dari Rafles disaat membangun kesepakatan pengalihan kontrak-kontrak dagang Belanda, hal inilah yang dimanfaatkan oleh sultan untuk memperoleh senjata, setelah bernegoisi yang cukup panjang akhirnya kesultanan mendapatkan empat peti yang berisi 80 pucuk senapan, 10 keranjang selongsong yang bermuatan peluru dan mesiu.⁴²

⁴¹ R.H.M Akib, *Perjuangan Sultan Machmoed Baderedin Ke-II* (Palembang, 1978), hlm. 22.

⁴² Nawiyanto and Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya*, hlm. 89-90.

Pada tahun 1819 terjadinya perang antara Kesultanan Palembang dengan Pemerintah Kolonial Belanda, perang ini memberikan dampak ekonomi bagi wilayah Kesultanan Palembang. lokasi perang ini terjadi di wilayah Sungai Musi, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan terganggunya kegiatan perekonomian karena Sungai Musi merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat kota Palembang. Sungai Musi sebagai tempat dilaksanakannya transaksi jual beli yang dilakukan para penduduk dengan para pedagang, peristiwa perang ini mengakibatkan perekonomian di wilayah Kesultanan Palembang mengalami penurunan baik dari segi penjualan oleh masyarakat pribumi maupun daya beli oleh para saudagar yang berlabuh di Palembang. Ini juga berdampak pada komoditi utama dari Kesultanan Palembang yaitu timah, dikarenakan adanya ketakutan dari penduduk ketika perang berlangsung. Mereka tidak mau mengambil resiko kerugian yang besar, lebih memilih berlindung di dalam rumah-rumah rakit mereka dan menjauhi pusat kota.⁴³

Selain itu perang yang terjadi pada tahun 1819 mengakibatkan juga adanya perubahan sosial di wilayah Kesultanan Palembang. Pada saat terjadinya perang, para pejabat istana diperintahkan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mengerahkan penduduk yang berada di wilayah dusunnya agar dapat membantu pasukan keraton dalam menghadapi Belanda. Para pejabat yang memiliki dusun meminta kepada pasirah atau kepala dusun untuk mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya. Selama perang berlangsung banyak pasirah yang meninggal dunia. Hal ini membuat Sultan Badaruddin II menunjuk saudara dari kerabat keraton itu sendiri untuk menjadi pasirah di dusunnya, ini membuat keluarga pasirah yang meninggal dunia menjadi rakyat biasa kembali ini membuat mereka kehilangan semua wewenang dalam memerintah dusunnya, karena pasirah yang baru ditentukan oleh kerabat keraton, seringkali kewibawaan pasirah yang baru kurang dihargai di masyarakat dusunnya. Mengatasi hal tersebut, pejabat keraton segera mengganti keluarganya yang menjadi pasirah dengan mengadakan sistem pemilihan pasirah yang baru di dusun tersebut, dengan tujuan terpilihnya pasirah baru yang berdasarkan pilihan masyarakat sendiri akan membuat mereka tetap setia kepada pejabat keraton tersebut serta kepada Kesultanan Palembang.⁴⁴

Tetapi pada tahun 1819 pasca perang perekonomian mulai bangkit kembali bahkan perdagangan bisa dikatakan semakin ramai dibandingkan sebelum terjadinya perang. Ini ditunjang dari keberhasilan Sultan Mahmud Badaruddin II mengalahkan pasukan Belanda. Sehingga membuat para saudagar dari Cina dan Arab tidak merasa takut untuk berdagang di

⁴³ Harianti and Sudrajat, "Dinamika Sejarah Sumatera Abad XIX," *Penelitian jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta* (2013): hlm. 39-40.

⁴⁴ Melisa Pransiska, "Perang Palembang Tahun 1819 Dn 1821: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Palembang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 99-100.

wilayah Kesultanan Palembang. Selain itu, ramainya perdagangan juga disebabkan oleh melimpahnya persediaan alam yang datang dari daerah pedalaman Kesultanan Palembang seperti buah dan karet. Keadaan ini menjadikan perekonomian di Kesultanan Palembang mengalami peningkatan yang cukup baik. Tapi hanya komoditas garam yang harganya sangat tinggi ini dipicu oleh terganggunya proses pengiriman garam dari Pulau Madura. Terganggunya proses tersebut lebih disebabkan oleh adanya usaha pemerintah Belanda untuk menggagalkan pengiriman melalui jalur laut.⁴⁵

Pada tahun 1821 daerah aliran sungai Musi menghasilkan produk pertanian seperti lada, kapas, beras, gambir lilin. Sedangkan daerah aliran sungai Lematang menghasilkan lada, kapas dan beras. Sementara rotan, lada dan beras dihasilkan oleh daerah aliran sungai Ogan. Kemudian daerah aliran Sungai Banyuasin dan Komering memproduksi hasil pertanian seperti beras dan lada. Diantara komoditas-komoditas tersebut lada adalah salah satu tanaman yang diwajibkan oleh sultan untuk ditanam, hasil panen dari lada kemudian dijual kepada kesultanan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh sultan sebagai ganti pajak yang harus mereka bayar.⁴⁶

Sultan Mahmud Badaruddin II pada tahun 1821 terus meningkatkan fasilitas persenjataan, dengan membeli dari penyelundup. Kesultanan juga mengembangkan kemampuan memproduksi peluru dan bubuk mesiu sendiri. Kemampuan ini diperoleh dari seorang tawanan Muntinghe yang kemudian menyebrang dan memihak Palembang. Bahkan kemampuan untuk membuat meriam dan senapan telah dikembangkan dengan bahan tembaga. Selain senjata modern, kesultanan juga mempersiapkan senjata-senjata tradisional seperti, pedang, tombak dan keris masih tetap digunakan oleh pasukan Palembang.⁴⁷

Pada tahun 1819 sampai 1821 Kesultanan Palembang kembali merdeka penuh dan mengalami kemajuan. Akan tetapi penghianatan dilakukan lagi oleh Pangeran Prabu Anom putra sulung Sultan Ahmad Najamuddin II.⁴⁸ Setelah pemerintahan kesultanan Palembang dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1821 semuanya berbalik, seluruh aspek kegiatan diambil oleh Belanda salah satunya ialah dibidang perekonomian. Dampak besar yang dirasakan oleh rakyat karena runtuhnya Kesultanan Palembang ialah seluruh hasil-hasil bumi Palembang di monopoli secara besar-besaran. Semua hasil panen dari kebun atau ladang mereka dibayar dengan harga yang sangat murah, dan terkadang tidak sebanding dengan

⁴⁵ Harianti and Sudrajat, "Dinamika Sejarah Sumatera Abad XIX," hlm. 41-42.

⁴⁶ Nawiyanto and Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya*, hlm. 74.

⁴⁷ Ibid., hlm. 90-91.

⁴⁸ Machi Sukadi, "Beberapa Piagam Sultan Palembang," *Jurnal Arkeologi Siddhayatra* Vol. 3, No. 1 (1998): hlm. 19.

biaya pemupukannya. Bagi rakyat yang tidak mempunyai ladang atau tidak memiliki apa-apa (golongan rendah) maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka mencari kayu-kayu bakar untuk dijual selain itu terkadang mereka juga menjala ikan di sungai yang hasilnya separuh untuk dijual dan separuhnya lagi untuk dimakan sendiri.⁴⁹

Pasang surut perdagangan yang terjadi pada masa Kesultanan Palembang tahun 1804-1821 yang diawali oleh bangkrutnya VOC yang merupakan organisasi dagang besar, mengakibatkan Belanda mengalami masalah ekonomi yang cukup sulit yang disebabkan oleh banyaknya hutang. Ini terbukti dengan adanya surat Sultan Mahmud Badaruddin II yang ditujukan kepada Deandels, dalam surat ini sultan menagih hutang dari pembayaran timah yang belum dilunasi oleh pihak Belanda. Setelah Belanda mundur kemudian digantikan oleh pemerintahan Inggris, masuknya Inggris ke Palembang menyebabkan banyak terjadinya konflik salah satunya konflik antar keluarga Kesultanan yang terjadi pada Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Ahmad Najamuddin II. Ini merupakan siasat Inggris untuk memecah belah keluarga kesultanan agar lebih mudah menguasai Palembang. Pada tahun 1818 bahkan kedua saudara ini pernah memerintah secara bersamaan. Timbulnya dua pusat kekuasaan yang saling bermusuhan mempengaruhi stabilitas perdagangan yang ada. Aktivitas perdagangan mengalami kemacetan dan kemudian mengalami kemunduran.

Bahkan seorang pengamat berkomentar bahwa perdagangan di Palembang pada tahun 1818 begitu meredup, pajaknya begitu sewenang-wenang dan para bangsawan tidak mau peduli dan sombong.⁵⁰ Tapi pada akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin II dapat menguasai lagi seluruh wilayah kesultanan dan perdagangan dihidupkan kembali. Pada penghujung abad ke-18 Palembang semakin kaya karena kesultanan banyak melakukan ekspor gelap .

Kemudian pada tahun 1819 terjadinya perang antar Palembang dan Belanda yang mengakibatkan pasang surut perdagangan. Perekonomian di wilayah Kesultanan Palembang mengalami penurunan baik dari segi penjualan maupun daya beli dikarenakan mereka tidak mau mengambil resiko kerugian yang besar dan lebih memilih untuk berlindung di dalam rumah mereka dan menjauhi pusat kota. Tetapi pasca perang perekonomian mulai bangkit kembali karena keberhasilan Sultan Mahmud Badaruddin II mengalahkan pasukan Belanda. Bahkan perdagangan jauh lebih ramai dibandingkan sebelum terjadinya perang. Tapi semua itu hanya berlangsung sampai tahun 1821 karena perang terjadi kembali, yang membuat Kesultanan Palembang dikalahkan oleh Belanda. Itu artinya Kesultanan Palembang dibawah

⁴⁹ Pransiska, "Perang Palembang Tahun 1819 Dn 1821: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Palembang," hlm. 123.

⁵⁰ Barbara Watson Andaya, *Hidup Bersaudara: Sumatera Tenggara Pada Abad XVII Dan XVIII*, trans. Septian Dhaniar Rahman and Aditya Pratama (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 390.

kendali pemerintahan Belanda. Hal ini berdampak pada perekonomian dimana semuanya dimonopoli oleh Belanda.

E. KESIMPULAN

Pasang surut perdagangan diakibatkan oleh banyaknya konflik yang terjadi di Palembang. Seperti konflik saudara yang terjadi antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Ahmad Najamuddin II yang saling memperebutkan kekuasaan. Ini membuat perekonomian di Palembang pada masa itu mengalami kemunduran. Tetapi berkat Sultan Mahmud Badaruddin II yang cerdas pada tahun 1818 dapat menguasai kembali seluruh wilayah Kesultanan Palembang dan memajukan kembali perekonomian kesultanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Makmun. *Kota Palembang Sebagai Kota Dagang Dan Industri*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Abdullah, Ma'moen, Bandiman, Djumiran, Wenny Ma'moen, Ping Harifin, and Moh. Alimansyur. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Palembang, 1991.
- Abubakar, Arlyana, Rita Krisdiana, Usep Sukarya, Dedi Irwanto, Muhammad Santun, Johannes Adiyanto, Rainci Maliati, Mirza Ardi Wibawa, and Alian Akbar. *Oedjan Mas Di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia Dan Heritage Di Sumatera Selatan*. Jakarta: Bank Indonesia Institue, 2020.
- Akib, R.H.M. *Perjuangan Sultan Machmoed Baderedin Ke-II*. Palembang, 1978.
- Andaya, Barbara Watson. *Hidup Bersaudara: Sumatera Tenggara Pada Abad XVII Dan XVIII*. Translated by Septian Dhaniar Rahman and Aditya Pratama. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Hanafiah, Djohan. *Melayu-Jawa: Citra Budaya Dan Sejarah Palembang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* Vol. 08. No. 01 (2014).
- Harianti and Sudrajat. "Dinamika Sejarah Sumatera Abad XIX." *Penelitian jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta* (2013).
- Irwanto, Dedi, and Alian Sair. *Metodologi Dan Historiografi Sejarah Cara Cepat Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2014.
- Masyhuri. "Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825." Tesis, Universitas Indonesia, 1983.

- Nawiyanto, and Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budayanya*. Jember: Tarutama Nusantara dan Jember University Press., 2016.
- Peeters, Jeroen. *Kaum Tuo - Kaum Mudo; Perubahan Religius Di Palembang 1821 - 1942*. Jakarta: INIS, 1997.
- Pransiska, Melisa. "Perang Palembang Tahun 1819 Dn 1821: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Palembang." Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Rahim, Husni. *Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Sair, Alian. "Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian." *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah* 2(2) (2012).
- Sevenhoven, J.I. Van. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Translated by Sugarda Purbakawatja. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Sukadi, Machi. "Beberapa Piagam Sultan Palembang." *Jurnal Arkeologi Siddhayatra* Vol. 3, No. 1 (1998).
- Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Syawaludin, Mohammad, and Muhammad Sirajuddin Fikri. *Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan Dan Pergantian Kekuasaan Di Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Rafah Press, 2019.
- Wargadalem, Farida R. *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Zed, Mestika. *Kepialangan Politik Dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Zubir, Zusneli. "Perjuangan Tionghoa Di Palembang." In *Bunga Rampai Sejarah Sumatera Selatan: Sumatera Selatan Dalam Kajian Sosial Dan Ekonomi*. Padang: BPSNT Padang Press, 2002.